PENARIKAN PAJAK PADA SAAT PANDEMI VIRUS CORONA DALAM PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM

Lutfi Mustofa¹

Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan UNILA Lampung
E-mail: lutfimustofasikom18@gmail.com

Abstrak

Kebijakan pajak yang dibuat pemerintah dimaksudkan untuk memberikan insentif bagi Wajib Pajak Beberapa insentif yang diberikan terkait, Pajak Penghasilan (PPH) Ps. 21 yang ditanggung oleh pemerintah, lalu pembebasan atas barang impor (Pajak Penghasilan (PPH) Ps. 22), Ada juga terkait pengurangan tarif angsuran Pajak Penghasilan (PPH) Ps. 25, dan percepatan restitusi, Berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, mulai dari prinsip etik dan ketauhidan, musyawarah, keadilan dan keseimbangan, serta prinsip amanah, Maka berdasarkan kebijakan ini, terlihat bahwa sudah ada keberpihakan pemerintah terhadap wajib pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penarikan pajak pada masa pandemic covid 19, diperbolehkan dengan catatan untuk membantuk meringankan beban pemerintah, namun disisilain juga harus mempertimbangkan kemampuan wajib pajak. Kewajiban tolong menolong ini sesuai dengan firman Allah. Qs: Al-Maidah Ayat 2.

Kata Kunci: Penarikan Pajak, Pandemi *Covid*, Prespektif Hukum Ekonomi Islam.

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan hasil literatur review terkait judul, ditemukan beberapa penelitian yang memiliki kesamaan, berikut beberapa hasil penelitian yang memiliki titik singgung dengan judul.

Penelitian A, Malik Madaniy dalam jurnal Al-Jami'ah No 56 Th. 1994 dengan judul Pajak dalam Prespektif Islam, dalam penelitian ini A, Malik Madaniy lebih memfokuskan pada konsep pajak (sumber pendapatan dan keuangan negara) dalam sejarah Islam yang dikenal sebagai (al-mawarid Al-maliyah lil Al-dawlah), sebagiannya

¹Mahasiswa Program Magister Ilmu Pemerintahan Konsentrasi Manajemen Pemerintahan Program Pascasarjana Universitas Lampung.

bersifat rutin (dawriyyah) yakni zakat, kharaj (pajak bumi), Jizyah (pajak jamiinan keamanan atas non muslim) dan 'usyuuur (pajak ekspor dan impor); sedangkan sebagian yang lain bersifat insidental (ghayr dawriyyah) yakni seperlima harta rampasan perang (ghanimah dan fay) seperlima hasil tambang (ma'adin) dan harta karun (rikaz), harta peninggalan orang yang tidak mempunyai ahli waris, harta temuan dan segala bentuk harta yang tidak diketahui secara pasti siapa pemiliknya.²

M. Kholil Nawawi, Zakat dan pajak adalah dua kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Islam di Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam persamaan dan perbedaan antara zakat dengan pajak. Meski sama-sama merupakan kewajiban dalam bidang harta, namun zakat dan pajak mempunyai falsafah yang khusus, dan keduanya berbeda sifat dan asasnya, berbeda sumbernya, sasaran, bagian serta kadarnya, di samping berbeda pula mengenai prinsip, tujuan dan jaminannya.

Ditekankan pula bahwa orang yang membayar pajak tidak dapat dikatakan telah membayar zakat, dan orang yang telah membayar zakat tidak dapat dikatakan telah membayar pajak. Meskipun demikian, apabila dana pajak dipergunakan untuk hal-hal yang secara diametral bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam dan kemaslahatan umum, serta tidak jelas pengelolaannya bahkan menjadi peluang untuk terjadinya korupsi dan lainnya, maka tidak wajib bagi umat Islam Indonesia untuk membayar pajak.³

Abdul Waid, Wabah pandemi *Covid-19* berdampak luas terhadap kehidupan bangsa dan negara, salah satunya terhadap ekonomi. Dalam masa pandemi Covid-19, membayar pajak pada

²A. Malik Madaniy, *Pajak dalam Prespektif Islam*, Al-Jami'ah No. 56 Tahun 1994. (Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), h. 24.

³M. Kholil Nawawi, *Hukum Membayar Zakat dan Pajak Bagi Umat Islam Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 156-169 Program Studi Ekonomi Syari'ah FAI-UIKA Bogor, h. 156.

dasarnya tetap harus dilakukan oleh semua warga masyarakat yang wajib pajak. Namun, saat pandemi *Covid-19*, banyak masyarakat wajib pajak yang merasa kesulitan untuk membayar pajak sebagaimana mestinya. Penegakan hukum pajak akan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak, mendorong kemudahan investasi, meningkatkan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Selain itu, perlu dilakukan strategi penerapan norma hukum pajak dengan pemberian Insentif PPh dan pemberian relaksasi administrasi pajak.⁴

Penelitian Muhamad Turmudi, lebih menfokuskan pada Pajak dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa Perbandingan Pemanfaatan Pajak dan Zakat). Pajak pada dasarnya dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam bidang dan sektor pembangunan, begitupun zakat dapat dimanfaatkan bagi pembangunan nasional, karena adanya banyak persamaan pokok antara pemanfaatan zakat dan pemanfaatan pajak, meski ada segi-segi khusus yang membedakannya seperti persyaratan pajak dan zakat serta penonjolan bidang yang didanai zakat dan pajak. Baik dan buruknya suatu sistem perpajakan tergantung dari dampaknya pada masyarakat. Sistem perpajakan terbaik adalah sistem yang menjamin keuntungan sosial terbanyak. Suatu sistem dimana kesejahteraan ekonomi suatu masyarakat dapat ditingkatkan.⁵

Penelitian Ghazali memfokuskan pada pajak dalam prespektif hukum Islam, Pungutan pajak tidak boleh memberatkan masyarakat, apalagi sampai menghambat perkembangan perekonomian suatu

⁴Abdul Waid, Penegakan Hukum Pajak Untuk Meneguhkan Ketahanan Ekonomi Indonesia Di Tengah Pandemi Covid-19, *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam Vol: 3, No. 2, Juni 2020 e-ISSN: 2621-3818 p-ISSN:2614-6894*, hlm. 74

⁵Muhamad Turmudi, *Pajak dalam Perspektif Hukum Islam*, (Analisa Perbandingan Pemanfaatan Pajak Dan Zakat), *Jurnal Al-'Adl Vol. 8, No. 1, Januari 2015*, h. 141.

bangsa lebih khusus menghambat masyarakat untuk berkembang, baik secara ekonomi, politik, dan kesejahteraan. Dalam term pajak, keadilan dapat di artikan kemampuan membayar dari wajib pajak (*ability to pay*) dan prinsip benefit (*benefit principle*). Keadilan adalah merupakan harapan dan cita-cita yang ingin direalisasikan dikehidupan yang nyata, dalam semua dimensi kehidupan sosial kemasyarakatan persoalan keadilan menjadi dagangan yang laris manis untuk diperbincangkan, hal itu juga tidak terlepas dari perspektif keadilan terhadap pungutan pajak.⁶

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut di atas *maka price of reaserch* pada penelitian ini adalah memfokuskan pada Penarikan Pajak pada Saat Pandemi Virus *Corona* dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam.

B. Kajian Pustaka

1. Konsep Penarikan Pajak

Pajak merupakan iuran yang wajib dibayar oleh rakyat sebagai sumbangan kepada negara, propinsi, kota praja dan sebagainya. Pemungutan pajak menjadi konsekuensi logis dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai pencerminan suatu keadilan untuk kesejahteraan, dengan berlandaskan pada teori dan asas-asas perpajakan yang sifatnya universal.

Pajak menurut Rochmat Soemitro adalah iuran rakyat kepada kas negara peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintahan dengan tidak mendapat jasa timbal (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum atau peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran

⁶ Gazali, *Pajak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, Mu'amatat*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume VII, Nomor 1 Juni 2015, h, 84.

rutin dan surplusnya digunakan untuk membiayai (*public investment*).⁷

Djajadiningrat,⁸ pajak merupakan suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman serta menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan bersifat memaksa dan tidak mendapatkan jasa imbal balik secara langsung.

Bertumpu pada mayoritas Negara, pajak merupakan salah satu devisa dalam menunjang keberhasilan pembangunan nasional.⁹ Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai publik investment.
- e. Selain bertujuan budgeter, pajak juga memiliki tujuan mengatur.¹⁰

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang- Undang (yang dapat dipaksakan)

⁷Rochmat Soemitro dalam Mardiosmo, *Perpajakan*, (Edisi Revisi 2009), h. 1.

⁸ Djajadiningrat dalam Tunggal Anshari Setia Negara, *Pengantar Hukum Pajak*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), h. 5.

⁹ Muhamad Turmudi, *Pajak dalam Perspektif Hukum Islam*, h. 130.

¹⁰Waluyo, Wirawan B.Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), h. 5.

dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang)
- b. Berdasarkan undang-undang Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh kontraprestasi pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermannfaat bagi masyarakat luas.¹¹

Pajak ialah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara di dalam menjalankan pemerintahan.¹²

2. Regulasi (Dasar Hukum)

Dasar Hukum Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-undang No. 6 Tahun 1983

¹¹ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006), h. 1.

¹² Tubagus Chairil Amachi Zandjani, *Perpajakan*. (Jakarta: PT Gramedia Utama, 1992), h. 1.

sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 tahun 2000.

Pengenaan pajak dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu Pajak Negara dan Pajak Daerah. Pajak Negara, pajak Negara yang sampai saat ini masih berlaku adalah:

a. Pajak Penghasilan (PPH)

Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000. Undang-undang pajak penghasilan berlaku mulai Tahun 1984 dan merupakan pengganti UU Pajak Perseroan 1925, UU Pajak Pendapatan 1944, UU PBDR 1970.¹³

b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPn BM).

Dasar hukum pengenaan PPN dan PPn BM adalah Undang-undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2000. UU PPN dan PPn BM efektif berlaku mulai tanggal 1 April 1985 dan merupakan pengganti UU Pajak Penjualan 1951.¹⁴

c. Bea Materai

Dasar hukum pengenaan Bea Materai adalah Undang-undang No. 13 Tahun 1985. Undang-undang Bea Materai berlaku mulai tanggal 1 Januari 1986 menggantikan peraturan dan Undang-undang Bea Materai Yang lama (aturan Bea Materai 1921).

d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

¹³Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 10.

¹⁴Untung Sukardji, *Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 17.

Dasar hukum pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1994. UU PBB berlaku mulai tanggal 1 Januari 1986.

- e. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Dasar hukum pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Undang-undang No. 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2000. UU BPHTB berlaku sejak tanggal 1 Januari 1998.¹⁵
- f. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah¹⁶

3. Teori Pelaksanaan Pemungutan Pajak

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, Negara berlandaskan kepada beberapa teori antara lain:

a. Teori Asuransi

Menurut teori ini negara berhak memungut pajak, karena negara bertugas melindungi jiwa dan harta benda warganya. Dengan demikian pembayaran pajak disamakan dengan pembayaran premi seseorang kepada perusahaan asuransi.¹⁷ Teori ini banyak yang menentang karena pembayaran pajak tidak dapat disamakan dengan premi oleh seseorang kepada perusahaan pertanggungan dan

¹⁵Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, h. 20.

¹⁶Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 51.

¹⁷Eko Lesmana, *Sistem Perpajakan di Indonesia*, (Jakarta: Prima Campus Grafika, 1994), Edisi ke.2, h. 5.

negara, tidak dapat dipersamakan dengan perusahaan asuransi karena:

- 1) Dalam hal timbul kerugian, misalnya adanya kematian, pembunuhan, dan pencurian atau perampokan tidak akan ada suatu pergantian dari negara.
- 2) Antara pembayaran jumlah-jumlah pajak dengan jasa perlindungan yang oleh negara tidak terdapat hubungan yang langsung.¹⁸

b. Teori Kepentingan

Menurut teori kepentingan, negara berhak memungut pajak karena negara melindungi kepentingan jiwa dan harta benda warganya dan di sini diatur pembagian beban pajak yang dikenakan pada warganya.

Pemerintah menyelenggarakan kepentingan bersama, untuk itu maka diperlukan biaya, yang mana biaya ini ditanggung oleh seluruh warganya dan kepentingannya diselenggarakan oleh pemerintah, tentang pembagian bebannya siapa yang paling banyak mendapat manfaat dari negara harus memikul pajak lebih besar, jadi semakin besar kepentingan seseorang terhadap tugas negara, semakin besar pula beban pajaknya.¹⁹

c. Teori Daya Pikul

Menurut teori ini, beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang, untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan, yaitu :

- 1) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang.

9. ¹⁸S.Munawir, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1990), Cet.ke I, h.

¹⁹Eko Lesmana, *Sistem Perpajakan di Indonesia*, h. 5.

2) Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan material yang harus dipenuhi.

d. Teori Daya Bakti

Menurut teori ini, dasar pembenaran pajak berdasarkan pemahaman bahwa negara mempunyai sifat sebagai persekutuan atau kumpulan individu (organisasi *staatsleer*) yang kedudukannya lebih penting dari pada individu itu sendiri karena sifatnya yang demikian, maka timbullah hak mutlak negara untuk memungut pajak kepada warganya, sebagai perwujudan tanda bakti dari warganya kepada negaranya. Teori ini, masih dianut meskipun tidak sesuai dengan kenyataan, karena antara individu dan persekutuan sebenarnya sama pentingnya.²⁰

e. Teori Daya Beli

Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak jika dipandang sebagai gejala dalam masyarakat dapat disamakan dengan pompa, yaitu mengambil daya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara, dan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya ke arah tertentu. Teori daya beli, menitik-beratkan ajarannya kepada fungsi kedua dari pemungutan pajak yaitu fungsi mengatur, menurut Prof. Andriani (salah satu penganut ajaran teori daya beli) menyatakan bahwa teori ini berlaku sepanjang masa, baik dalam masa ekonomi bebas maupun dalam masyarakat sosialis.²¹

4. Kebijakan Pajak pada Saat Pandemi *Covid-19*

Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada

²⁰Eko Lesmana, *Sistem Perpajakan di Indonesia*, h. 5.

²¹Eko Lesmana, *Sistem Perpajakan di Indonesia*, h. 22.

manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernapasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).

Penyakit ini terutama menyebar di antara orang-orang melalui tetesan pernapasan dari batuk dan bersin. Virus ini dapat tetap bertahan hingga tiga hari dengan plastik dan stainless steel SARS CoV-2 dapat bertahan hingga tiga hari, atau dalam aerosol selama tiga jam⁴. Virus ini juga telah ditemukan di feses, tetapi hingga Maret 2020 tidak diketahui apakah penularan melalui feses mungkin, dan risikonya diperkirakan rendah.²²

Pandemi covid-19 melanda hampir semua negara di dunia, termasuk Negara Indonesia. Kesiapan dan ketahanan sosial, ekonomi, politik dan keamanan nasional semua negara diuji untuk mengatasi berbagai dampak yang timbul dari pandemi. Dalam konteks komunitas dunia, Indonesia sebagai negara modern tidak bisa lepas dari pengaruh dan kerjasama dengan negara-negara di seluruh dunia. Kerjasama dengan berbagai negara yang saling menguntungkan sangat membantu bagi Negara Indonesia dalam mewujudkan tujuan memajukan kehidupan bangsa dan kesejahteraan umum. Pada sisi lain, kondisi finansial Indonesia rentan dipengaruhi kondisi ekonomi global yang mengalami kelesuan, bahkan keberhentian yang tidak bisa diprediksi sebelumnya²³

²²Safrizal ZA,dkk. *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 bagi Pemerintah Daerah Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis dan Manajemen*, (Jakarta: Kemndagri, 2020) h. 3.

²³Susilia Adiyanta, *Fleksibilitas Pajak sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal untuk Mengantisipasi Krisis Ekonomi sebagai Akibat Dampak Pandemi Covid-19*, *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 2 Issue 1, 2020.

World Health Organization (WHO) menetapkan status pandemi global Covid-19 setelah virus berbahaya ini menyebar ke sebagian besar wilayah dunia. Jumlah yang tertular dan korban meninggal terus bertambah sedangkan titik terang pengobatannya yang efektif belum ditemukan. Pengumpulan massa dalam jumlah besar telah dihentikan untuk menghindari proses penularan seperti sekolah, kampus, tempat hiburan, konferensi, dan termasuk di antaranya aktivitas ibadah seperti shalat Jumat Iran dan Malaysia telah menghentikan jumatan di masjid.²⁴

Kebijakan pembaruan perpajakan nasional yang telah dirancang dengan baik oleh pemerintah pada dasarnya dapat berkontribusi dalam mendukung pembiayaan nasional melalui reformasi regulasi dan administrasi perpajakan modern dengan kebijakan dalam praksis perpajakan yang mengkombinasikan fungsi-fungsi pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran untuk membuat kebijakan bagi Pemerintah sebagai pihak yang mempunyai otoritas dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis ekonomi sebagai akibat dampak pandemi Covid-19.²⁵

Pembuat kebijakan yaitu Pemerintah telah melakukan segala upaya dalam mengurangi dampak yang terjadi. Pada masa pandemi saat ini, banyak kebijakan dibuat untuk merangsang keadaan untuk semua lini yang terdampak mengalami penurunan atau perlambatan agar dapat naik

²⁴Eman Supriatna1, *Wabah Corona Virus Disease Covid 19 Dalam Pandangan Islam*, SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 6 (2020), pp.555-564 DOI: 10.15408/sjsbs.v7i6.15247. h. 558.

²⁵Fauziah Aqmarina, dan Imahda Khoiri Furqon, *Peran Pajak Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Dalam Mengantisipasi Krisis Ekonomi Pada Masa Pandemi Covid-19*, FINANSIA Vol. 03, No. 02, Juli - Desember 2020, h. 258.

kembali dan laju pertumbuhannya kembali sesuai dengan koridor yang diinginkan pemerintah. Kebijakan perlu mengacu pada permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Ketetapan yang diterbitkan oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk menangani permasalahan tersebut, dan mencapai tujuan khusus yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan, keperluan dan keuntungan kepada masyarakat. Sehingga penetapan kebijakan harus dilandasi dengan tujuan pencapaian penyelesaian permasalahan yang sedang dihadapi.

Kebijakan pajak yang dibuat pemerintah dimaksudkan untuk memberikan insentif bagi Wajib Pajak (WP) yang terkena dampak wabah virus corona dengan menerbitkan PMK No. 44/2020, tentang Insentif Pajak untuk membantu dan melindungi Wajib Pajak yang terdampak dalam penurunan ekonomi saat ini. Beberapa insentif yang diberikan terkait, Pajak Penghasilan (PPh) Ps. 21 yang ditanggung oleh pemerintah, lalu pembebasan atas barang impor (Pajak Penghasilan (PPh) Ps. 22), Ada juga terkait pengurangan tarif angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Ps. 25, dan percepatan restitusi (Munandar, 2020). Kebijakan-Kebijakan lain juga dibuat untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Dikeluarkan kebijakan oleh pemerintah terkait perpajakan bertujuan untuk membantu meningkatkan dan mempercepat arus keuangan dan barang serta produksi agar menjadi stabil dan mampu bertahan dalam masa pandemi serta mensejahterakan semua yang akan merasakan manfaat dari kebijakan ini.²⁶

²⁶Padyanoor, A. *Kebijakan Pajak Indonesia Menanggapi Krisis COVID-19: Manfaat bagi Wajib Pajak*. E-Jurnal Akuntansi, 30(9), 2216-2230. 2020. h. 2218-2219.

Kebijakan fiskal merupakan tindakan pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya ekonomi. Kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi dua golongan yakni penstabil otomatis (*automatic stability policy*) dan kebijakan diskresioner (*discretionary fiscal policy*). Kebijakan fiskal otomatis merupakan bentuk-bentuk sistem fiskal yang sedang berlaku yang secara otomatis cenderung dapat menimbulkan kestabilan dalam kegiatan ekonomi. Sedangkan, kebijakan fiskal diskresioner atau kebijakan aktif adalah suatu langkah dalam bidang pengeluaran pemerintah dan perpajakan yang secara khusus membuat perubahan dengan tujuan untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian yang dihadapi masyarakat (Prasetyo, 2009)²⁷

5. Pemungutan Pajak dalam Islam

Dalam bahasa arab, pajak dikenal dengan istilah *Al-Ushr* atau *Al-maks* atau bisa juga disebut *Adh-Dharibah* yang mempunyai arti pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Atau kadang-kadang istilah pajak yang bisa digunakan dalam bahasa arab yaitu *Al-kharaj* namun *Al-kharaj* ini biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus. Sedangkan menurut KBBI, pajak adalah pungutan wajib, yang biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya²⁸.

²⁷Agus Waluyo, *Kebijakan Fiskal dan Upaya Mengatasi Disparitas Ekonomi Perspektif Islam*, Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Volume 17, No. 1, Juni 2017: 19-38. h. 20.

²⁸Diakses dari: <https://almanhaj.or.id/2437-pajak-dalam-islam.html> pada Tanggal: 10 Maret 2021.

Pajak menurut syariah, secara etimologi pajak berasal dari bahasa arab disebut dengan istilah dharibah, yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan. Secara bahasa maupun tradisi, dharibah dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai dharibah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa jizyah dan kharaj dipungut secara dharibah, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut kharaj merupakan dharibah. Jadi, dharibah adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain jizyah dan kharaj, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan dharibah.²⁹

Jika membuka lembaran dari sejarah zakat dan pajak pada zaman Rasulullah saw. Dan pemerintah Islam periode awal (Khulafaa Ar-rasyidiin) khususnya pada zaman sahabat Umar ibn Khatab r.a, pemerintah menangani secara langsung pengumpulan dan pendistribusian zakat dengan mandat kekuasaan. Pengelolaan zakat dilakukan *waliyul Amr* ini adalah pemerintah, sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat Taubah: 103. Di negara Islam, pengelolaan keuangan negara ditangani oleh Bayt al-mal. Bayt al- Mal sama dengan kementerian keuangan (*treasury*) yang menangani masalah keuangan serta hal-hal yang berkaitan dengan perbendaharaan negara (*national exchequer*). Sekalipun Bayt al-mal secara institusional telah dibentuk oleh khalifah Umar ibnu Khattab. Kebijakan fiskal negara sebenarnya telah diberlakukan pada masa Nabi SAW. Al-Quran dan as-Sunnah sering menyinggung kebijakan fiskal

²⁹ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 27-28.

negara. Antara lain: pengelolaan zakat oleh negara, pemungutan al-jizyah dari kaum ahl-kitab, pemberlakuan hukum al-fay' dan al-ghanimah, serta kebijakan Nabi SAW atas kepemilikan umum.³⁰

Namun tidak semua umat Islam berpendapat bahwa pajak itu haram, mereka yang menerima pajak sebagai suatu kewajiban yang diberikan oleh penguasa juga memberikan dalil tentang dibolehkannya pungutan atas pajak. Perdebatan mengenai boleh atau tidaknya pemungutan atas pajak tidak akan menghasilkan apa-apa jika tidak diawali dengan pemahaman yang sama tentang apa saja sumber-sumber pendapatan negara yang diperbolehkan dalam Islam, karena pajak sendiri merupakan salah satu sumber pendapatan negara terbesar. Pendapatan Negara (*Mawarid Ad-Daulah*) pada zaman pemerintahan Rasulullah Muhammad SAW (610-632M) dan Khulafauryidid (632-650M) yang diklasifikasikan menjadi 3 kelompok besar, yaitu: *Ghanimah*, *Fa'i*, dan *Shadaqah* atau Zakat. *Fa'i* dibagi lagi atas 3 macam yaitu *Kharaj*, *'Ushr* dan; *Jizyah* (lihat Abu Ubaid dalam Kitab Al Amwal, Abu Yusuf dalam Kitab Al Kharaj, Ibnu Taimiyah dalam Kitab Majmu'atul Fatawa dan Imam Al Mawardi dalam Kitab Al Ahkam Al Shulthaniyah)³¹.

6. Nilai-nilai Islam dalam Sistem Perekonomian Islam

Berdasarkan uraian mengenai syarat, prinsip, dan tujuan pajak menurut Islam diatas, Karim (2003: 52) menerangkan bahwa ada lima nilai-nilai filosofis Islam yang menjadi dasar dalam sistem perekonomian Islam, yaitu:

³⁰Denil Setiawan, *Analisis Zakat Sebagai Instrument Kebijakan Fiskal Pada Masa Khalifah Umar Bin Khattab* R.A, Al Amwal: Vol. 1, No. 2, Februari 2019, h. 119.

³¹Diakses dari: <https://www.pajak.go.id/artikel/pajak-haramkah> pada tanggal: 10 Maret 2021.

yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (QS Al-Baqarah (2) ayat 188).

Selain itu, Islam juga tidak memperbolehkan sedikitpun mengambil harta umat Muslim, selain dengan cara yang hak menurut syara', yang telah ditunjukkan oleh dalil-dalil syara' yang rinci. Rasulullah Saw bersabda:

“Tidak halal harta seorang Muslim, kecuali dengan kerelaan dirinya.” (HR: Bukhari dan Muslim).

Prinsip kebijakan penerimaan negara yang berlandaskan nilai tauhid adalah pemungutan pajak dilakukan hanya ketika ada tuntutan kemaslahatan umum, yang mesti didahulukan untuk mencegah kemudharatan. Dalam keadaan tertentu (darurat), Ulil Amri wajib mengadakan kebutuhan rakyat, di saat ada atau tidaknya harta. Tanpa dipenuhinya kebutuhan tersebut, besar kemungkinan akan datang kemudharatan yang lebih besar lagi. Atas dasar inilah negara boleh mengadakan suatu jenis pendapatan tambahan.

b. Musyawarah

Musyawah adalah unsur pokok dalam masyarakat yang beriman, sebagai perintah langsung dari Allah SWT. Para pejabat pemerintah yang menangani pajak harus mempertimbangkan secara adil, obyektif dan seksama dan matang dalam menetapkan tarif pajak. Pemerintah harus menyampaikan dan membawa aspirasi rakyat banyak, bukan hanya memikirkan kepentingan pribadi atau golongan.

Pemerintah dalam menjalankan sistem perekonomian haruslah memegang nilai musyawarah dimana pemerintah tidak semena-mena dalam menjalankan otoritasnya dan seluruh kegiatan ekonomi yang dijalankan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan musyawarah untuk mengetahui bagaimana kondisi dan kebutuhan masyarakatnya. Selain itu, nilai musyawarah juga memiliki indikator transparansi. Transparansi ini dibutuhkan untuk menanamkan kepercayaan masyarakat terhadap apa yang dijalankan oleh pemerintah dalam suatu negara.

c. Keadilan ('Adl) dan Keseimbangan

Sistem ekonomi syariah memandang keadilan dan keseimbangan merupakan sesuatu hal yang mutlak untuk diamalkan oleh pelaku ekonomi. Perlunya hal ini berulang kali ditegaskan dalam Al-Quran. Keadilan dan keseimbangan merupakan syarat mutlak untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Keadilan dan keseimbangan ini harus teraplikasi sedemikian rupa antara anggota masyarakat yang melakukan hubungan ekonomi. Artinya keadilan dan keseimbangan tersebut bukan hanya pada tataran teoritis tetapi juga dalam tataran teknis. Islam mendefinisikan adil sebagai “tidak mendzalimi dan tidak didzalimi”. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak boleh untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Allah menegaskan bahwa Ia sangat mencintai orang-orang yang berlaku adil seperti dalam firman-Nya dalam QS Al-Mumtahanah [60] ayat 8:

salah satu pertanggungjawaban kita kepada Tuhan nantinya.

d. Amanah

Amanah (tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas) menjadi misi hidup setiap muslim. Dalam sistem ekonomi syariah manusia sebagai khalifah pemegang amanah Allah di muka bumi. Nilai ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap individu muslim.

Pertanggungjawaban mempunyai arti bahwa manusia sebagai amanah memikul tanggung jawab atas segala keputusan-keputusan yang diambilnya. Kumpulan individu dengan kredibilitas dan tanggung jawab yang tinggi akan melahirkan masyarakat yang kuat, karena dilandasi oleh saling percaya antar anggotanya. Nilai Amanah memainkan peranan yang fundamental dalam ekonomi dan bisnis, karena tanpa kredibilitas dan tanggung jawab kehidupan ekonomi dan bisnis akan hancur.

Oleh karena itu, pemerintah yang menjadi khalifah untuk menjalankan dan bertanggung jawab terhadap perpajakan di Indonesia haruslah menanamkan nilai Amanah di dalam diri mereka, sehingga masyarakat dapat mempercayakan pajak yang mereka bayarkan untuk dikelola, didistribusikan, dan digunakan pada tujuan semestinya. Dan pemerintah harus bisa mempertanggungjawabkan kepercayaan yang diberikan masyarakat tersebut.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode studi pustaka menggunakan teknik

analisis secara deskriptif untuk melihat secara mendalam mengenai Penarikan Pajak pada Saat Pandemi Virus Corona dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam.

D. Penarikan Pajak pada Saat Pandemi Virus Corona dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam

Terdapat beberapa alasan kebolehan penarikan pajak dalam Islam, sebagai berikut:

Pertama, disebabkan Ghanimah dan Fay'i berkurang (bahkan tidak ada). Pada masa pemerintahan Rasulullah SAW dan Shahabat, Pajak (Dharibah) belum ada, karena dari pendapatan Ghanimah dan Fay'i sudah cukup untuk membiayai berbagai pengeluaran umum negara. Namun setelah setelah ekspansi Islam berkurang, maka Ghanimah dan Fay'i juga berkurang, bahkan sekarang tidak ada lagi karena kaum Muslim sudah jarang berperang. Akibatnya, pendapatan Ghanimah dan Fay'i tidak ada lagi, padahal dari kedua sumber inilah dibiayai berbagai kepentingan umum negara, seperti menggaji pegawai/pasukan, mengadakan fasilitas umum (rumah sakit, jalan raya, penerangan, irigasi, dan lain-lain), biaya pendidikan (gaji guru dan gedung sekolah)³².

Kedua, munculnya Pajak (Dharibah) karena terbatasnya tujuan penggunaan Zakat. Sungguhpun penerimaan Zakat meningkat karena makin bertambahnya jumlah kaum Muslim, namun Zakat tidak boleh digunakan untuk kepentingan umum seperti menggaji tentara, membuat jalan raya, membangun masjid, apalagi untuk non Muslim sebagaimana perintah Allah SWT pada QS.[9]: 60. Bahkan Rasulullah SAW yang juga adalah kepala negara selain Nabi, mengharamkan diri dan keturunannya memakan uang Zakat (Fikhus Sunnah, Sayyid

³²Diakses dari: <https://www.pajak.go.id/artikel/pajak-haramkah-pada> Tanggal: 10 Maret 2021.

Sabiq). Zakat juga ada batasan waktu (*haul*) yaitu setahun dan kadar minimum (*nishab*), sehingga tidak dapat dipungut sewaktu-waktu sebelum jatuh tempo. Tujuan penggunaan Zakat telah ditetapkan langsung oleh Allah SWT dan dicontohkan oleh RasulNya Muhammad SAW. Kaum Muslim tidak boleh berijtihad didalam membuat tujuan Zakat, sebagaimana tidak boleh berijtihad dalam tata cara Shalat, Puasa, Haji, dan ibadah Mahdhah lainnya. Pintu Ijtihad untuk ibadah murni sudah tertutup.

Ketiga, munculnya Pajak (Dharibah) karena mencari jalan pintas untuk pertumbuhan ekonomi. Banyak negara-negara Muslim memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah, seperti: minyak bumi, batubara, gas, dan lain-lain. Namun mereka kekurangan modal untuk mengeksploitasinya, baik modal kerja (alat-alat) maupun tenaga ahli (skill). Jika SDA tidak diolah, maka negara-negara Muslim tetap saja menjadi negara miskin. Atas kondisi ini, para ekonom Muslim mengambil langkah baru, berupa pinjaman (utang) luar negeri untuk membiayai proyek-proyek tersebut, dengan konsekuensi membayar utang tersebut dengan Pajak.

Keempat, sebab munculnya Pajak (Dharibah) adalah karena Imam (Khalifah) berkewajiban memenuhi kebutuhan rakyatnya. Jika terjadi kondisi kas negara (*Baitul Mal*) kekurangan atau kosong (karena tidak ada Ghanimah dan Fay'i atau Zakat), maka seorang Imam (khalifah) tetap wajib mengadakan tiga kebutuhan pokok rakyatnya yaitu keamanan, kesehatan dan pendidikan. Jika kebutuhan rakyat itu tidak diadakan, dan dikhawatirkan akan muncul bahaya atau kemudharatan yang lebih besar, maka Khalifah diperbolehkan berutang atau memungut Pajak (Dharibah). Jika terjadi kondisi

Baitul Mal kekurangan atau kosong (karena tidak ada Ghanimah dan Fay'i atau Zakat), maka seorang Imam (khalifah) tetap wajib mengadakan tiga kebutuhan pokok rakyatnya yaitu Keamanan, Kesehatan dan Pendidikan, sebagaimana hadits Rasulullah Saw yang artinya "Diriwayatkan dari Salamah bin Abdullah bin Mahdhan Al Khathami, dari ayahnya, bahwa ia mempunyai hubungan dekat, bahwa Rasulullah saw. Bersabda:" Barang siapa diantaramu yang bangun di pagi hari dalam kegembiraan, sehat badan, dan mempunyai bahan makanan pada hari itu, maka ia seolah-olah diberikan seluruh dunia ini.". (HR Tirmidzi). Juga hadits Rasulullah SAW yang artinya,"Seorang Imam (Khalifah) adalah adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan dia akan diminta pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya, (HR Muslim).

Dalam keadaan kekosongan Baitul Mal, seorang Khalifah tetap wajib mengadakan berbagai kebutuhan pokok rakyatnya, untuk mencegah timbulnya kemudharatan, dan mencegah suatu kemudharatan adalah juga kewajiban, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diartikan "Segala sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan demi terlaksananya kewajiban selain harus dengannya, maka sesuatu itupun wajib hukumnya³³."

Berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, mulai dari prinsip etik dan ketauhidan, musyawarah, keadilan dan keseimbangan, serta prinsip amanah.

Ada beberapa keadaan yang membuat penarikan pajak pada saat musim pandemi covid 19 diperbolehkan:

1. Kondisi keuangan Negara mengalami defisit anggaran, dan terancam memasuki zona degradasi, sehingga membutuhkan implus (masukan keuangan yang cukup

³³Diakses dari <https://www.pajak.go.id/artikel/pajak-haramkah-pada-Tanggal-10-Maret-2021>.

banyak) maka sebagai rakyat yang taat kepada khalifah (pemerintah) sudah seharusnya ikut membantu keuangan Negara.

2. Dalam rangka mengadakan pemungutan pajak, pemerintah hendaknya melihat kondisi masyarakat, sebab wabah covid 19 ini bukan hanya berdampak pada ekonomi negara, tetapi juga berdampak kepada ekonomi (pendapatan perkapita) sehingga tidak terkesan memberatkan masyarakat.
3. Dikarenakan bukan hanya satu atau dua orang yang terkena dampak covid 19 secara ekonomi, maka diusahakan pembayaran pajak bisa diringkankan dan pihak penerima dana dalam hal ini pemerintah benar-benar bisa menjalankan amanahnya dengan sebaik-baiknya.

Sedangkan apabila ditinjau dari Kebijakan pajak yang dibuat pemerintah dimaksudkan untuk memberikan insentif bagi Wajib Pajak (WP) yang terkena dampak wabah virus corona dengan menerbitkan PMK No. 44/2020, tentang Insentif Pajak untuk membantu dan melindungi Wajib Pajak yang terdampak dalam penurunan ekonomi saat ini. Beberapa insentif yang diberikan terkait, Pajak Penghasilan (PPh) Ps. 21 yang ditanggung oleh pemerintah, lalu pembebasan atas barang impor (Pajak Penghasilan (PPh) Ps. 22), Ada juga terkait pengurangan tarif angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Ps. 25, dan percepatan restitusi (Munandar, 2020). Kebijakan-Kebijakan lain juga dibuat untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19.

Maka berdasarkan kebijakan ini, terlihat bahwa sudah ada keberpihakan pemerintah terhadap wajib pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penarikan pajak pada masa pandemic covid

19, diperbolehkan dengan catatan untuk membantuk meringankan beban pemerintah, namun disisilain juga harus mempertimbangkan kemampuan wajib pajak.

Kewajiban tolong menolong ini sesuai dengan firman Allah. Qs: Al-Maidah: 2.

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

Artinya: "... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya". (Qs: Al-Maidah: 2).

Menurut Buya Hamka, dalam tafsir Al-Azhar, menafsirkan kata tolong-menolong. Peninjauan kepada maksud ayat ini bisa menjadi meluas kepada perkembangan lebih jauh. Banyak pekerjaan kebajikan yang lain tidak dapat dipikul seorang diri; dengan tolong-menolong baru lancar. Mendirikan langgar atau mesjid, mendirikan rumah sekolah, mengatur pendidikan kanak-kanak, mendirikan rumah pemeliharaan orang miskin, mengadakan Da'wah Agama. Dan 1001 macam pekerjaan kebajikan yang lain, baru dapat diangkat dengan tolong-menolong. Maka timbullah fikiran mendirikan perkumpulan-perkumpulan Agama.³⁴

Lebih lanjut Qurai Syihab, dalam Tafsir Al-Misbah, menyampaikan "Dan janganlah sekali-kali kebencian yang telah mencapai puncaknya sekalipun kepada suatu kaum karena

³⁴Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Tafsir Al-Azhar Jilid 3, (Juzu' 6), (Singapura: Pustaka Nasional, Pte Ltd, tt). h. 1600.

mereka menghalang-halangi kamu dari Masjid al-Haram, mendorong kamu berbuat aniaya kepada mereka atau selain mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan, yakni segala bentuk dan macam hal yang membawa kepada kemaslahatan duniawi dan atau ukhrawi dan demikian juga tolong-menolonglah dalam ketakwaan, yakni segala upaya yang dapat menghindarkan bencana duniawi dan atau ukhrawi, walaupun dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kamu, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.³⁵

Berdasarkan dua pendapat mufasir di atas maka sebenci apapun kita kewajiban tolong-menolong tetap harus senantiasa dilaksanakan dengan baik, selagi kegiatan tersebut dalam suasana kebajikan. Maka berdasarkan ayat ini penarikan pajak di musim wabah pandemi covid 19 diperbolehkan dalam rangka saling tolong menolong dalam kebajikan dan taqwa

E. Kesimpulan

Kebijakan pajak yang dibuat pemerintah dimaksudkan untuk memberikan insentif bagi Wajib Pajak (WP) yang terkena dampak wabah virus corona dengan menerbitkan PMK No. 44/2020, tentang Insentif Pajak untuk membantu dan melindungi Wajib Pajak yang terdampak dalam penurunan ekonomi saat ini. Beberapa insentif yang diberikan terkait, Pajak Penghasilan (PPh) Ps. 21 yang ditanggung oleh pemerintah, lalu pembebasan atas barang impor (Pajak Penghasilan (PPh) Ps. 22), Ada juga terkait pengurangan tarif angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Ps. 25, dan percepatan restitusi. Berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, mulai dari

³⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*; Volume 3 Surat Al-Maidah. (Tangerang: Lentera Hati, 2005), cet: IV. h. 10.

prinsip etik dan ketauhidan, musyawarah, keadilan dan keseimbangan, serta prinsip amanah. Maka terlihat bahwa sudah ada keberpihakan pemerintah terhadap wajib pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penarikan pajak pada masa pandemic covid 19, diperbolehkan dengan catatan untuk membantuk meringankan beban pemerintah, namun disisilain juga harus mempertimbangkan kemampuan wajib pajak.

F. Daftar Pustaka

A. Malik Madaniy, *Pajak dalam Prespektif Islam*, Al-Jami'ah No. 56 Th. 1994. Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2008.

Abdul Waid, *Penegakan Hukum Pajak untuk Meneguhkan Ketahanan Ekonomi Indonesia di Tengah Pendemi Covid-19*, LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam Vol: 3, No. 2, Juni 2020 e-ISSN: 2621-3818 p-ISSN:2614-6894.

Agus Waluyo, *Kebijakan Fiskal dan Upaya Mengatasi Disparitas Ekonomi Perspektif Islam*, Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Volume 17, No. 1, Juni 2017.

Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Denil Setiawan, *Analisis Zakat Sebagai Instrument Kebijakan Fiskal Pada Masa Khalifah Umar Bin Khatthab R A*, Al Amwal: Vol. 1, No. 2, Februari 2019.

Diakses dari <https://www.pajak.go.id/artikel/pajak-haramkah> pada tanggal 10 Maret 2021

Djajadiningrat dalam Tunggal Anshari Setia Negara, *Pengantar Hukum Pajak, Malang*, Bayumedia Publishing, 2008.

Eko Lesmana, *Sistem Perpajakan di Indonesia*, Jakarta : Prima Campus Grafika, 1994

Eman Supriatna¹, *Wabah Corona Virus Disease Covid 19 dalam Pandangan Islam*, SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 6 (2020), pp.555-564 DOI: 10.15408/sjsbs.v7i6.15247.

- Fauziah Aqmarina, dan Imahda Khoiri Furqon, *Peran Pajak Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Mengantisipasi Krisis Ekonomi Pada Masa Pandemi Covid-19*, FINANSIA Vol. 03, No. 02, Juli - Desember 2020.
- Gazali, *Pajak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Mu'amalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume VII, Nomor 1 Juni 2015.
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Haji Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar Jilid 3*, (Juzu' 6), Singapura: Pustaka Nasional, Pte Ltd, tt.
- M. Kholil Nawawi, *Hukum Membayar Zakat dan Pajak Bagi Umat Islam di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*; Volume 3 Surat Al-Maidah. Tangerang: Lentera Hati, 2005.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006.
- Muhamad Turmudi, *Pajak dalam Perspektif Hukum Islam, (Analisa Perbandingan Pemanfaatan Pajak dan Zakat)*, Jurnal Al-'Adl Vol. 8, No. 1, Januari 2015.
- Padyanoor, A. *Kebijakan Pajak Indonesia Menanggapi Krisis COVID-19: Manfaat bagi Wajib Pajak*. E-Jurnal Akuntansi, 30(9), 2216-2230. 2020.
- Rochmat Soemitro dalam Mardiosmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi 2009.
- S.Munawir, *Perpajakan*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1990.
- Safrizal ZA,dkk. *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 Bagi Pemerintah Daerah Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis dan Manajemen*, Jakarta: Kemndagri, 2020
- Susilia Adiyanta, *Fleksibilitas Pajak sebagai Instrumen Kebijaksanaan Fiskal untuk Mengantisipasi Krisis Ekonomi*

sebagai Akibat Dampak Pandemi Covid-19, Administrative Law & Governance Journal, Volume 2 Issue 1, 2020.

Tubagus Chairil Amachi Zandjani, *Perpajakan*. Jakarta: PT Gramedia Utama, 1992.

Untung Sukardji, *Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Waluyo, Wirawan B.Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2002.